

Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Karunrung Kota Makassar

Nur Halizah^{1*}, Muhammadiyah², Hafiz Elfiansya Parawu³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to describe and explain the influence of Headman leadership on community awareness in paying Land and Building Tax (PBB) in Karunrung Village, Rappocini District, Makassar City. The type of research in this study was quantitative research. Quantitative research is a measured method with the intention to test a predetermined hypothesis. Variables were measured with research data so that the data was collected, tabulated and provides the information needed. The results showed a significant influence of village head's leadership on community awareness of paying Land and Building Tax in Karunrung Village, Rappocini District, Makassar City. The community's awareness was strongly influenced by factors; leadership, motivation and public knowledge about the urgency of taxes for regional development.

Keywords :leadership, public awareness, united nations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode yang diukur dengan maksud untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan/ditetapkan. Variabel-variabel diukur dengan data penelitian sehingga data tersebut terkumpul, ditabulasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Kesadaran masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor; kepemimpinan, motivasi dan pengetahuan masyarakat tentang urgensi pajak bagi pembangunan daerah.

Kata Kunci: kepemimpinan, kesadaran masyarakat, pbb

* halizahnur@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, untuk pemantapan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat ada pada Daerah Tingkat II. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Pedesaan yang dulunya adalah pajak pusat namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) berubah menjadi pajak Daerah.

Di Kotamadya Makassar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sumber pendapatan daerah yang memberi kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tidak hanya di Kota Makassar, tapi hampir semua daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) banyak bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga pemasukan dari sektor PBB ini sangat mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan yang telah direncanakan.

Berbagai masalah yang menyangkut penagihan PBB terus menerus dibenahi untuk dapat

memperoleh hasil yang maksimal. Setiap Pemerintah Daerah mempunyai kiat atau cara dalam penagihan PBB. Beberapa kesulitan dalam penagihan PBB adalah 1) rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, 2) sulitnya mendapatkan alamat wajib pajak untuk lahan kosong, rumah kosong, rumah kos/kontrak, 3) sistem penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal.

Ketua RT dan RW adalah representase warga yang berdomisili dalam wilayah RT/RW bersangkutan. Namun demikian masih ditemukan berbagai macam kendala dalam hal penagihan PBB di Kelurahan Karunrung sehingga pemasukan PBB belum maksimal. Menurut pengamatan penulis, diantara 3 masalah yang menyangkut penagihan Pajak Bumi dan

Rendahny kesadaran warga dalam pembayaran pajak disebabkan karena sebagian besar warga tidak mengerti dan kurangnya pemahaman akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang wajib membayar pajak.

RW/RT sebagai organisasi kemasyarakatan secara eksplisit bukan merupakan perangkat kelurahan akan tetapi sebagai mitra kelurahan. Untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak, peran lurah dan ketua-ketua lembaga kemasyarakatan sangat diperlukan karena mereka bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat atau warga kelurahan.

perbandingan data pendapatan pajak dari tahun 2016-2018 sebagai berikut :pada tahun 2016 target yang akan dicapai sebesar 647.838.608 akan tetapi yang terealisasi hanya 339.275.817 dengan persentase 70%. Begitu pula dengan tahun 2017 tidak mengalami peningkatan dilihat dari target yang terealisasinya hanya 312.177.630 dengan persentase 65% lebih rendah dari tahun 2016.Sedangkan pada tahun 2018 jumlah target yang akan dicapai semakin meningkat disebabkan objek wajib pajak yang juga bertambah yaitu 817.625.000 akan tetapi yang terealisasi hanya 320.130.152 lebih menurun lagi dari dua tahun sebelumnya jadi yang membayar iuran pajak hanya 54%. Hal menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih sangat kurang.

Peran Kepala Lurah itu sendiri sangat penting sebagai pemimpin di lingkup masyarakat, sehingga berhasil tidaknya suatu pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan tergantung dari pada peran Lurah itu sendiri. Pada penelitian ini yang terkait dengan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan peran Lurah sangatlah penting sebagai pemimpin dan pelaksana dibidang pemerintahan khususnya kesadaran masyarakat membayar Pajak yang di lakukan di Kelurahan Karunrung Kota Makassar.

Menanggapi hal tersebut, maka dibutuhkan pengaruh Kepemimpinan Lurah sebagai Kepala Pemerintahan untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di wilayahnya dan dapat memotivasi dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan aparat maupun masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satunya adalah dengan taat membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Stoner dalam Pasolong (2007 : 111) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah metode mengarahkan dan mempengaruhi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok.Selanjutnya Robbins (2001 : 163), “Kepemimpinan adalah pusat dan penentu kebijakan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam organisasi”. Menurut Slamet (2002 : 29), “Kepemimpinan yakni kemampuan dalam mempengaruhi suatu kelompok

untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan yakni suatu kemampuan, proses, atau fungsi yang pada umumnya untuk mempengaruhi individu supaya berbuat sesuatu dalam pencapaian tujuan tertentu”.

Selanjutnya Kartono (2004 : 153), mengatakan “kepemimpinan ialah kemampuan untuk memberi pengaruh yang konstruktif kepada orang lain supaya melakukan suatu usaha kooperatif dalam mencapai target yang sudah di canangkan”. Rivai (2004 : 65) mengatakan kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu mekanisme guna mempengaruhi orang lain ”.

Dari penjabaran definisi di atas, kepemimpinan merupakan cara atau bagaimana mempengaruhi, memberikan contoh seorang pemimpin kepada anggotanya atau bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Kartono (2008 : 207) indikator-indikator kepemimpinan adalah sebagai berikut ; 1) kemampuan pengambilan keputusan, merupakan suatu konsep pendekatan yang bersifat sistematis terhadap kebenaran pilihan dalam menentukan sikap atau pilihan yang dianggap paling benar, 2) kemampuan memotivasi yakni, merupakan upaya memprovokasi suatu anggota organisasi berkenaan untuk mendorong keahliannya dan

keterampilannya dalam bentuk kekuatan dan waktu untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya, dalam hal pencapaian suatu tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, 3) kemampuan komunikasi, yakni Suatu bentuk penyampaian pesan, gagasan atau pemikiran terhadap orang lain dengan tujuan supaya orang tersebut dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan benar, baik di ucapkan langsung atau secara tidak langsung, 4) kemampuan mengendalikan bawahan, Pemimpin mampu mendukung para anggotanya dengan memotivasi mereka dapat mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuasaan jabatan secara efektif demi kepentingan jangka panjang, 5) tanggung jawab, Setiap pemimpin harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap bawahannya. Tanggung jawab disini dapat didefinisikan sebagai kewajiban menanggung, memikul, menanggung sebab akibatnya dan 6) kemampuan mengendalikan emosi, Kemampuan mengendalikan emosi adalah persolan prinsipil bagi keberhasilan hidup kita. Semakin mudah kita mengendalikan emosi semakin mudah kita memperoleh kebahagiaan.

Menurut (Hasibuan : 2012) “kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara tulus dan ikhlas mematuhi semua peraturan dan mengerti akan kewajiban dan tanggung jawabnya”. Kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Sedangkan masyarakat adalah kumpulan orang pada waktu tertentu yang berada disuatu daerah dengan tujuan yang sama.

Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu sikap merasa tahu, mengingat akan keadaan yang sebenarnya atau ingat terhadap kewajibannya. Widjaya (1984 :14) Selanjutnya kesadaran dapat di definisikan sebagai suatu sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti dalam hal ini patuh terhadap peraturan atau ketentuan perundangan yang telah dibuat, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat.

Atau dapat diartikan kesadaran masyarakat bersifat statis yaitu sesuai peraturan perundang-undangan berupa ketentuan dalam masyarakat dan kesadaran dinamis yang menitik beratkan kesadaran yang muncul dari dalam diri manusia, yang muncul dari kesadaran moral, yaitu rasa tanggung jawab.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat diartikan sebagai suatu keadaan yang sebenarnya mengerti keadaan dirinya, menyeimbangkan dan menelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Kesadaran masyarakat akan mendorong timbulnya keinginan untuk memperhatikan kepentingan bersama guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Sehubungan dengan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran PBB ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yang lebih dikaitkan dengan gambaran kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut sehubungan dengan faktor golongan sosial, politik atau ekonomi, serta tingkat pendidikan, sifat dan bentuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Satjipto, Rahardja (Wiwoho 1990 : 91) bahwa tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sesungguhnya bersumber dari dalam diri masyarakat itu sendiri.

Adapun indikator yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat

adalah sebagai berikut ; 1) struktur sosial masyarakat, 2) lingkungan, 3) pelayanan pemerintah, 4) prosedur yang memudahkan wajib pajak dan yang ke 5) sanksi.

Sehubungan dengan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran PBB ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yang lebih dikaitkan dengan gambaran kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut sehubungan dengan faktor golongan sosial, politik atau ekonomi, serta tingkat pendidikan, sifat dan bentuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Satjipto, Rahardja (Wiwoho 1990 : 91) bahwa tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sesungguhnya bersumber dari dalam diri masyarakat itu sendiri

Andriani dalam Darwin,(2010 :15), pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai suatu pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk langsung digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara.

Dari definisi diatas, Darwin mengemukakan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut : 1) Pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Setiap undang-undang harus selalu dipaksakan pemberlakuannya. Siapa yang ditetapkan oleh undang-undang mematuhi apa yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi atau hukuman,2) Di dalam pembayaran pajak tidak dapat diperlihatkan adanya kontra prestasi individual dari pemerintah,3) Pajak dipungut oleh negara baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dimanadari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan dalam hal pembiayaan investasi publik, dan 5) Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*.

Kemudian menurut Siahaan (2013 : 553), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan selain wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Adapun yang menjadi penentuan lokasi dilaksanakannya penelitian adalah Kantor Lurah Karunrung Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dan tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif. Selain itu, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan bertujuan untuk mengumpulkan data, informasi dan responden yang dianggap betul-betul dapat memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah observasi dan kuesioner. Sedangkan kuesioner yakni adalah mengumpulkan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada seluruh objek yang terkait, yaitu masyarakat (wajib pajak) yang mana dalam hal ini wajib pajak atau masyarakat yang pernah berhubungan langsung dengan lurah Karunrung Kota Makassar untuk memperoleh data terkait dengan kepemimpinan lurah (X) dan kesadaran

masyarakat (Y). Angket ini kemudian disebarkan kepada semua sampel yang telah ditentukan sebelumnya yakni 62 sampel.

.Dalam teknik pengumpulan data secara kuesioner, instrument yang digunakan yaitu angket untuk mengukur variabel yang diteliti.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala likert untuk menilai sikap/pendapat responden tentang aspek kepemimpinan lurah dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan dengan menggunakan kriteria interpretasi persetujuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak wilayah Kota Makassar terletak di wilayah pesisir pantai Barat bagian selatan pulau Sulawesi. Secara geografis, Kota Makassar berada pada garis Lintang antara 05°31'30,"81-05°14'6,"49 LS dan garis Bujur antara 119°28;19"-119V32;31"BT. Wilayah Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 32 km yang membentang luas dari arah Selatan ke arah Utara, membujur ke arah Timur Laut.

Wilayah Kota Makassar mencakup beberapa pulau, diantaranya ada 13 pulau yang mempunyai nama, yaitu : Pulau Kayangan, Pulau Lae-Lae, Pulau Lanjukang, Pulau Barangkeke, Pulau Kodinga Renglombo, Pulau Samalona dan Pulau-pulau kecil lainnya.

Secara administratif Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai luas wilayah seluas 17.577 Ha atau 0, 28 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan, Kota makassar terdiri dari 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan.

Kelurahan Karunrung adalah salah satu Kelurahan dari 11 kelurahan di wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Batas wilayah Kelurahan Karunrung adalah : sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari dan Kelurahan Tidung, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Minasa Upa, dan sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mappala dan Kelurahan Kassi-kassi.

Kelurahan Karunrung dulunya masuk wilayah Kelurahan Rappocini yang kemudian dimekarkan sejalan dengan pemekaran Kecamatan Tamalate menjadi dua dengan disahkannya Kecamatan

Rappocini. Wilayah Kelurahan Karunrung terdiri dari 10 RW dan 44 RT. Yang dijadikan lokasi penelitian adalah RT. 02/RW.04 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 62 orang.

Luas wilayah Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar adalah 140 km² yang terdiri dari pemukiman, jalan, pertokoan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan rawa-rawa. Jumlah penduduk Kelurahan adalah 11.562 jiwa.

Struktur organisasi merupakan tata hubungan antara unit kerja dalam suatu organisasi, sehingga struktur organisasi merupakan system yang antara satu unit dengan yang lainnya saling terikat dan terorganisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Hubungan kerjasama antara unit menjadi kunci kesuksesan organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Analisis deskriptif kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum data, cara penyajian data, dan cara meringkas data, hasil perhitungan sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran umum variabel.

Penelitian ini mengamati variabel kepemimpinan dengan simbol X dan variabel kesadaran masyarakat dengan simbol Y. masing-masing variabel

indikatornya dituangkan kedalam pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam Skala Likert untuk memasukkan kategori dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang di ajukan.

Penelitian ini dilakukan di RT. 02/RW.04 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang dilaksanakan dari bulan Juni s/d Juli 2019.

Variabel Kepemimpinan (X), Kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin mempengaruhi dan menjadi teladan bagi anggotanya atau bawahannya untuk suatu tujuan organisasi. Biasa juga diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan, ada pula yang mengartikan sebagai suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan pola yang konsisten dalam rangka mencari solusi dari permasalahan bersama.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan ditabulasi, langkah selanjutnya adalah analisis data tentang variabel kepemimpinan.

Adapun indikator kepemimpinan adalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan mengambil keputusan, dalam penelitian ini kemampuan mengambil keputusan adalah bagian dari indikator dalam variabel kepemimpinan untuk melihat gaya kepemimpinan lurah dalam mengambil

- sebuah keputusan di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar apakah dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin bisa tegas atau tidak. Pengambilan keputusan merupakan suatu konsep pendekatan yang bersifat sistematis terhadap kebenaran pilihan dalam menentukan sikap atau pilihan yang di anggap paling benar, 2) Kemampuan memotivasi wajib pajak yakni adalah salah satu indikator kepemimpinan yang harus dimiliki lurah untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar PBB. Kemampuan memotivasi juga merupakan upaya untuk memprovokasi suatu anggota organisasi berkenaan untuk mendorong keahliannya dan keterampilannya dalam bentuk kekuatan dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan- kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya, dalam hal pencapaian suatu tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, 3) Kemampuan komunikasi atau kemampuan memberikan informasi kepada wajib pajak adalah salah satu indikator kepemimpinan lurah dimana pemimpin dapat menjaga dengan baik komunikasinya dengan bawahan dan masyarakat. Kemampuan komunikasi

merupakan suatu bentuk penyampaian pesan, gagasan atau pemikiran terhadap orang lain dengan tujuan supaya orang tersebut dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan benar, baik dalam penyampaian langsung maupun tidak langsung, 4) Kemampuan mengendalikan bawahan adalah salah satu indikator kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin dalam rangka mengendalikan bawahan agar berpikir dan bekerja secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan. Dimana pemimpin mampu mendukung para bawahannya dengan memotivasi mereka supaya dapat mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuasaan atau jabatan secara efektif demi kepentingan jangka panjang, 5) Bertanggung jawab adalah salah satu indikator variabel kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dalam hal ini bertanggung jawab dalam pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambil, tanggung jawab disini dapat didefinisikan sebagai kewajiban menanggung, memikul dan menanggung sebab akibat yang akan terjadi, dan yang terakhir 6) Kemampuan mengendalikan emosi juga adalah salah satu indikator kepemimpinan dimana kemampuan mengendalikan emosi merupakan

persoalan prinsipil bagi keberhasilan. seorang pemimpin harus mengendalikan emosinya dalam setiap hal yang dilakukan dalam pekerjaan.

Selanjutnya indikator kesadaran masyarakat yakni sebagai berikut : 1) struktur sosial masyarakat menjadi salah satu indikator dari variabel kesadaran masyarakat, dimana di dalam lingkungan sosial, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan tentang tujuan adanya Pajak Bumi dan Bangunan, 2) Sikap petugas dalam menagih pajak merupakan hal yang sangat penting, mengingat setiap orang petugas yang ramah, sopan dan dengan bahasa yang santun dalam melakukan penagihan pajak. Dalam penagihan pajak sikap petugas merupakan salah satu indikator agar memudahkan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak, 3) Pelayanan pemerintah dalam hal ini meliputi, upaya pemerintah dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan, memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya dan memberi perlakuan yang adil terhadap wajib pajak disesuaikan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, 4) Prosedur yang memudahkan wajib pajak dalam hal ini adalah merupakan salah satu indikator kesadaran masyarakat, yang meliputi; aspek

kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam memahami peraturan dan kemudahan pengisian formulir dan sistem pembayaran yang memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan yang ke 5) Pajak adalah kewajiban setiap warga negara untuk memenuhinya. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban mengenai pembayaran pajak yang telah di tetapkan peraturan perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi. Sanksi akan diberikan ketika wajib pajak tidak membayar pajak atau telat membayar pajak. Sanksi di berlakukan agar wajib pajak mematuhi aturan dan disiplin terhadap pembayaran pajak.

Hasil analisis deskriptif tentang indikator prosedur yang memudahkan wajib pajak dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden yang tertinggi adalah 39,5% dan yang terendah yang berpendapat tidak berpengaruh sebesar 4,8%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator sanksi berada pada kategori berpengaruh.

Berdasarkan hasil penelitian kesadaran masyarakat untuk membayar PBB di Kelurahan Karunrung Kota Makassar di peroleh dari jumlah skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner sebanyak 2297, maka tanggapan dari 62 responden terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB

di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Hasil penelitian terhadap variabel kepemimpinan (X) menunjukkan jumlah skor 67,4% dan variabel kesadaran masyarakat (Y) menunjukkan jumlah skor 74,1%, keduanya berada pada interval 61-80%, dengan criteria penilaian berpengaruh.

Dengan demikian hipotesis Ho bahwa tidak ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar ditolak dan dengan dengan sendirinya hipotesa Ha adalah pengaruh antara kepemimpinan dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar diterima.

Hasil penelitian terhadap variabel kepemimpinan (X) menunjukkan bahwa prosentase jawaban responden mencapai 67,4 %, dengan demikian variabel kepemimpinan lurah berada dalam katagori berpengaruh.

Dari 12 pertanyaan yang diajukan kepada 62 responden menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara kepemimpinan lurah dan kesadaran masyarakat. Peran Lurah Karunrung sebagai pemimpin dalam

wilayah Karunrung sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya membayar PBB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 indikator kepemimpinan semuanya dalam kategori berpengaruh. Deskripsi jawaban responden pada setiap tabel rekapitulasi indikator kepemimpinan menunjukkan pengaruh variabel kepemimpinan yang positif dan signifikan terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Adanya penagihan PBB di Kelurahan Karunrung yang tidak maksimal atau tidak mencapai target yang di tetapkan, mungkin perlu ada evaluasi terhadap kebijakan atau pendekatan yang dilakukan Lurah Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar terhadap wajib pajak atau mendorong ketertiban tokoh masyarakat untuk ikut mensosialisasikan pentingnya pembayaran PBB bagi pembangunan daerah.

Berbagai kebijakan yang menyangkut pembayaran PBB, seperti; sosialisasi, motivasi, himbuan, informasi, membangun komunikasi, aktif mendorong partisipasi wajib pajak memenuhi kewajibannya dan sebagainya, adalah aktifitas yang harus

dilakukan Lurah secara berkesinambungan (*sustainability*).

Wawancara kami dengan Ketua RW. 04 Kelurahan Karunrung, beliau berpendapat bahwa keterlibatan ketua-ketua RW/RT adalah hal sangat penting dalam mendorong peningkatan atau pencapaian target pemasukan PBB, karena RW/RT yang paling mengenal dan memahami kondisi dan latar belakang kultural warganya. Bagaimana Lurah bisa memanfaatkan kharisma dan elektabilitas ketua RW/RT untuk mendorong pencapaian target pemasukan PBB.

Banyak sarana/prasarana yang dapat digunakan Lurah untuk bertemu wajib pajak, misalnya; pertemuan arisan, mesjid dan rapat-rapat yang secara rutin dilakukan di tingkat RW. Komunikasi yang dibangun oleh pemimpin secara rutin akan membuat wajib pajak merasa dekat dan peduli dengan apa yang disampaikan seorang pemimpin.

Berbagai pendekatan sosial (*social approach*) dimana Lurah dapat menunjukkan kepedulian, keramah tamahan, dihormati, dipercaya dan menjadi panutan bagi pegawai dan masyarakat Kelurahan Karunrung.

Hasil penelitian terhadap variabel kesadaran masyarakat (Y) menunjukkan prosentase nilai yang diperoleh adalah

74,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran masyarakat berada pada katagori berpengaruh.

Struktur sosial masyarakat yang terkait dengan pengetahuan, mentalitas, mampu atau tidak mampu membayar PBB.Selanjutnya sikap petugas dalam menagih PBB dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak dilakukan dengan komunikasi yang santun, sopan dan ramah sehingga wajib pajak dapat menerima penjelasan yang diberikan, termasuk prosedur pembayaran yang mudah.

Menyangkut pelayanan pemerintah dalam hal ini Kantor Kelurahan Karunrung, meliputi; upaya sosialisasi PBB yang menyangkut pentingnya PBB bagi pembangunan daerah, PBB adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap penyusunan APBD dan yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan pelayanan yang lebih baik ketika pemasukan PBB bisa dimaksimalkan.

Selanjutnya, masyarakat atau wajib pajak harus mengetahui bahwa pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan terhadap negara.Kewajiban ini bersifat absolut sehingga ada sanksi terhadap siapapun yang tidak membayar pajak.Penerapan sanksi ini harus tegas

dan berlaku untuk setiap masyarakat tanpa ada pengecualian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam pembahasan yang telah diuraikan mengenai Pengaruh Kepemimpinan Lurah terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karunrung Kota Makassar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 1) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karunrung Kota Makassar diperadakan, 2) Bahwa Lurah sebagai birokrat yang berhubungan langsung langsung dengan pelayanan masyarakat, memiliki kemampuan untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 3) Bahwa dalam kepemimpinan Lurah Karunrung berbagai kebijakan harus dilakukan menyangkut sosialisasi, motivasi, informasi, komunikasi serta pendekatan sosial yang disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.4) kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar

PBB menjadi tujuan dari kegiatan sosialisasi, motivasi dan komunikasi yang dilakukan lurah, sehingga masyarakat dapat menyeimbangkan antara hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2004. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 2016. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Rivai, Veithzal. 2002. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Organizational Behavior 9th Ed*. Upper Sadle River. New Jersey : Prentice Hall Internasional.
- Slamet, S. 2002. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, HW. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta : Pemda DKI Jakarta.
- Wiwoho, B. 1990. *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta : Bina Rena Paraariw.